GWR/3/1/2006

DASAR-DASAR PANDANGAN DALAM MELAKUKAN TINJAUAN TERHADAP KARYA STUDI SEJARAH MENGENAI PERISTIWA POLITIK

I. Dasar Pandangan Secara umum

(1) Setiap peristiwa politik tidaklah berdiri sendiri, melainkan suatu proses berantai secara dialektis, aksi-reaksi ; dan tidak selalu dalam poros "diad", bisa "multi-pihak".

(2) Setiap peristiwa politik pada hakekatnya merupakan pertarungan kekuasaan/kekuatan (atau setidaknya merupakan bagian dari proses itu).

(3) Menurut pemahaman saya, "konspirasi" terjadi ketika berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, bertemu pada suatu "titik"-kepentingan, sebagai "tujuan-antara" (*intermediate end*). Karena sebenarnya kepentingannya berbeda-beda, maka adalah lazim bahwa di dalam suatu "komplotan" tertentu, dapat terjadi proses persaingan, atau bahkan konflik internal, yang semuanya itu melatar belakangi dan menentukan sikap dan langkahnya masing-masing (saling mengkhianati, saling "menunggangi", dlsb).

(4) Dalam proses peristiwa politik, menurut saya, konsep "konspirasi" itu tidak hanya mengacu kepada satu komplotan saja, tetapi mencakup juga lawannya. Apalagi jika sebenarnya terdapat "banyak pihak". Tidak satu dalang.

(5) Dalam melakukan studi mengenai suatu peristiwa politik, pada umumnya orang berusaha untuk mengidentifikasi "siapa" atau "pihak mana" yang memicu terjadinya peristiwa tersebut (atau siapa "mastermind" – atau dalangnya). Pada titik inilah biasanya orang mudah terjebak ke dalam penafsiran yang tergesa-gesa

bahwa pemicu itulah “biang-keladinya”. Padahal dalam permainan politik, apalagi pada jaman modern yang serba lebih canggih ini, banyak kemungkinan yang melatar belakangi mengapa sesuatu pihak melakukan suatu langkah yng secara nyata dianggap memicu (mungkin sebagai “memancing”, mungkin justru “terpancing”, mungkin juga karena salah hitung, salah info, dsb.).

(6) Oleh karena itu, di dalam melihat suatu peristiwa politik, khususnya konflik-politik, seharusnya kita tidak menilai dari kacamata hukum. Sebab, justru hukum itu biasanya dijadikan instrumen bagi para pemain dalam berbagai manuvernya. Karena, dalam permainan politik, masalahnya bukan “salah atau benar” secara hukum, tetapi “kalah atau menang”. Itulah sebabnya di dalam politik ada kata-kata: “*The winner is king, the loser is thief !*” Suatu kudeta, jika menang, akhirnya diakui juga. Ini kenyataan sejarah di mana-mana

II. Aspek Metodologi dalam Studi Sejarah

(1) Sepanjang yang saya ketahui, keunikan ilmu sejarah adalah bahwa dalam melakukan penelitian ataupun studi, dituntut adanya dua azas yang harus dipenuhi, yang di dalam disiplin ilmu yang lain – karena sifatnya – tidak disyaratkan (atau bahkan berkebalikan). Dua azas tersebut adalah:

(a) Principle of validity of the main source.

(b) Principle of exhaustiveness.

(2) Azas yang pertama

Tentu saja, dalam disiplin ilmu yang lain soal validitas sumber itu juga menjadi syarat, tetapi ilmu sejarah menuntut adanya satu sumber yang disebut “sumber utama”. Validitas SU inilah yang dipersoalkan. SU yang dipakai haruslah sumber yang sudah teruji validitasnya (melalui perdebatan terbuka diantara “*peer group*” nya).

(3) Azas yang kedua

Di sinilah uniknya ilmu sejarah. Di satu pihak disyaratkan adanya satu sumber utama, tapi di lain pihak dituntut tercakupnya semua sumber secara tuntas. Satu saja sumber terlewatkan, nilai karya studi menjadi rendah. Dalam disiplin ilmu yang lain, referensi itu justru selektif, dipilih secukupnya saja, yang relavan, asal memenuhi aspek-aspek "*confimatio"* dan "*refutatio".*

(4) Disadari atau tidak, ilmuwan sejarah itu sebenarnya sering menghadapi dilema :

(a) Di satu sisi, jika jarak waktu antara suatu peristiwa dengan penulisan sejarahnya terlalu dekat,maka ada dua masalah yang dihadapi yaitu pertama, bahan-bahan belum lengkap; kedua, para pelaku sejarah masih banyak yang hidup. Ini memang menguntungkan karena merupakan data primer, namun sekaligus juga menjadi masalah, karena bias pribadi dalam memberikan informasi sulit dihindari sebab – terutama dalam peristiwa politik – menyangkut sikap keberpihakan tertentu.

(b) Di sisi lain, yaitu sebaliknya, jika jarak waktu tersebut terlalu lama, semua saksi hidup sudah tak ada. Ilmuwan bisa lebih independen mengambil jarak sehingga bisa lebih obyektif, namun sekaligus juga menghadapi masalah. Karena, yang ada adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder itu dalam proses transfer informasi dari waktu ke waktu, sengaja atau tak sengaja, seringkali mengalami distorsi. (Banyak contoh tentang distorsi ini).

(5) Catatan ini merupakan pandangan dari seorang yang bukan sejarahwan, yang tentu saja pengetahuannya amat sangat terbatas. Para sejarahwan kita pasti sudah sangat memahami masalah-masalah tersebut di atas. Tujuan catatan ini hanya sekedar mengingatkan dan menekankan kembali aspek-aspek

tertentu yang dianggap penting di dalam melakukan tinjauan terhadap karya tulis yang menyangkut suatu peristiwa politik yang begitu penting seperti peristiwa tragedi nasional 1965.

III. Buku-Buku Studi Tentang G.30.S 1965

(1) Tulisan berupa artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku sebagai hasil studi tentang peristiwa politik di Indonesia 1965 itu ternyata jumlahnya banyak sekali (lebih dari 110 buah). Dibanding dengan peristiwa-peristiwa lain, baik di Indonesia maupun di lain negara, jumlah tersebut bukan main besarnya ! Bahkan 40 tahun sesudah peristiwa tersebut berlalu, masih bermunculan tulisan-tulisan mengenai tragedi nasional Indonesia itu. Fakta ini sendiri menunjukkan bahwa peristiwa tersebut masih mengandung banyak teka-teki bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Para pakar, ilmuwan, peneliti (baik ilmuwan politik maupun sejarahwan) masih terus memburu berbagai bahan untuk dapat mengungkap secara lebih pasti apa yang sesungguhnya terjadi. Namun sampai sekarangpun masih belum jelas benar bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Perdebatan di antara para pakar belum selesai (dan mungkin tidak akan pernah selesai). Mengapa? Paling tidak ada dua hal yang saling berkaitan.

(2) Pertama, peristiwa tersebut adalah peristiwa politik, dalam konteks pertarungan ideologi besar dunia saat itu, karena itu, bagaimana pun juga usaha setiap pakar untuk bersikap obyektif, bias pribadi sulit dihindari karena menyangkut sikap keberpihakan yang berbeda-beda. Apalagi kejadian tersebut dalam perspektif sejarah belum terlalu lama terjadi.

Kedua, dokumen-dokumen rahasia – dari pihak yang mana pun – belum (atau mungkin tidak akan) semuanya bisa terungkap.

(3) Pada umumnya, secara eksplisit maupun implisit, bahan-bahan utama yang dipakai sebagai titik tolak adalah dokumen-dokumen resmi dari hasil Mahmilub (yang masih diperdebatkan validitasnya). Dari lebih dari 100 tulisan-tulisan yang ada tersebut di atas, sebagian besar adalah karya pakar ilmu politik, yang tentu saja dua azas metodologi tersebut di depan itu cenderung diabaikan. Bahkan pakar-pakar sejarah pun ada juga diantaranya yang tak peduli dengan azas yang kedua.

IV. Buku Victor M. FIC (VMF): "Anatomy of the Jakarta Coup": 1 Oct 1965

(1) Buku ini terbit dalam bahasa Inggris di India, tahun 2004, dan di Indonesia diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 2005, sekaligus diterbitkan pula terjemahannya, dengan judul: Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi.

(2) Buku terseut merupakan jilid terakhir (Jilid III) dari serial tiga jilid, karya Prof. Dr. Victor M.Fic, seorang guru besar ilmu politik, berkebangsaan Checoslovakia. Menurutnya, dalam pengantar, Jilid I dan II itu (yang tentu saja saya belum pernah membacanya) merupakan penelusuran sejarah yang jauh menjorok ke belakang untuk memahami berfungsinya berbagai sistem kerajaan di Jawa. Benang merahnya adalah bahwa inti kebudayaan Jawa adalah pluralisme. Dua jilid tebal-tebal itu tentu saja mengasyikkan.

(3) Yang menarik dari Jilid III (tentang Kudeta 1965) itu, terutama bagi saya pribadi, adalah bahwa beredarnya buku ini bersamaan pula dengan maraknya kembali pembahasan tentang buku lama karya Dr. Antonie Dake, "In the Spirit of the Red Banteng" (1973), yang isinya senada. (Bahkan Dake juga datang di Indonesia dan sempat "talk show" bersama Dr. H. Sulistyo dari LIPI, di TV). Ini menimbulkan pertanyaan: "Ada apa ini ?".

(4) Buku VMF tersebut di atas itu cukup tebal sehingga untuk mengupas lebih mendalam tentu memerlukan uraian yang panjang lebar. Karena itu, pada kesempatan ini hanya beberapa pokoknya saja (tidak semua) yang dikemukakan – Apalagi hal-hal lebih rinci (yang banyak sekali mengundang komentar) belum sempat dituangkan di sini. Menurut saya, buku VMF itu:

(a) Jika itu dinilai sebagai karya sejarah, buku tersebut kurang memenuhi dua "principles" tersebut di atas.

(b) Walaupun penulisnya nampak berusaha untuk se-obyektif mungkin (beberapa kali memberikan peringatan – "caveat"), namun dari ruaian-uraian awalnya saja, sudah nampak adanya predisposisi tertentu.

(c) VMF berusaha untuk menganalisis secara rinci sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Namun justru karena itu, dia terjebak ke dalam "inconsistencies", dan bahkan – karena melanggar prinsip kedua tersebut di depan – menggunakan info-info yang belum dicek kebenarannya.

(d) Dalam peristiwa politik, pernyataan-pernyataan ataupun dokumen-dokumen seharusnya dibaca secara hati-hati, dan dibedah adanya kemungkinan berbagai makna. VMF kurang melakukan itu. Semuanya digunakan "telanjang-telanjangan" saja.

Demikian komentar sementara saya, terhadap buku YMF secara sepintas.

Bogor, Januari 2006

Gunawan Wiradi